

RINGKASAN

TEGUH BAYU AJI, Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika”, Komisi Pembimbing, Ketua Dr. Kuart Puji Prayitno, S.H., M.Hum., Anggota Dr. Budiyo, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum perundang-undangan yang lebih tepat digunakan dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan menganalisis ketentuan khusus tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang Narkotika masih relevan dipertahankan dengan adanya ketentuan khusus pidana tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Pencucian Uang telah mendukung penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan kasus dan golongannya. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika, penerapan pasal-pasal yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang telah dapat menekan terjadinya tindak tindak pidana narkotika. Ketentuan khusus tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang Narkotika relevan dipertahankan dengan adanya ketentuan khusus pidana tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika, undang-undang masih terpisah yaitu antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Pencucian Uang, dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkotika.

Kata kunci: Penegakan hukum, Pencucian uang, Asal Tindak pidana Narkotika

SUMMARY

TEGUH BAYU AJI, Master of Law Study Program, Jenderal Soedirman University, "Law Enforcement of Money Laundering Crimes Derived from Narcotics Crimes", Advisory Committee, Chair Dr. Kuat Puji Prayitno, S.H.M.Hum., Member Dr. Budiyono, S.H.M.Hum.

This study aims to analyze law enforcement laws that are more appropriate to use in money laundering crimes originating from Narcotics crimes and to analyze the special provisions for money laundering crimes regulated in the Narcotics Law which are still relevant to be maintained by the existence of special provisions for criminal acts. money laundering regulated in the Act on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. With a normative juridical approach, the research specifications are descriptive in nature. Data collection by means of literature study, is presented in the form of narrative text which is arranged systematically, and analyzed normatively qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that law enforcement of money laundering crimes originating from narcotics crimes uses Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics or Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The Money Laundering Law has supported the application of money laundering crimes against perpetrators of narcotics crimes according to the case and class. Legislation related to money laundering crimes that have to do with narcotics crimes, the application of the articles imposed on perpetrators of money laundering crimes has been able to suppress the occurrence of narcotics crimes. The special provisions for the crime of money laundering regulated in the relevant Narcotics Law are maintained by the existence of special provisions for the crime of money laundering regulated in the Law on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, in the handling of criminal acts of money laundering and narcotics crimes, law -The law is still separate, namely between Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, in handling money laundering crimes and narcotics crimes.

Keywords: Law Enforcement, Money Laundering, Origin of Narcotics Crime